

Peringatan HAN 2023, Jokowi Minta Seluruh Anak Indonesia Terlindungi

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati pada Minggu (23/7) meminta seluruh anak Indonesia harus terlindungi.

Jokowi menegaskan, generasi terbaik bangsa terlahir dari zaman yang memberikan tempat untuk anak tumbuh bebas, cerdas, dan ceria.

"Generasi terbaik bangsa selalu lahir dari zaman yang memberi tempat yang lapang bagi setiap anak untuk bertumbuh bebas, cerdas, dan ceria," ujar Presiden Jokowi melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (23/7).

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar anak-anak Indonesia terlindungi. Ia juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa agar memberikan anak-anak Indonesia untuk berkembang. "Perlindungan dan

kesempatan bagi anak untuk berkembang adalah pertaruhan masa depan bangsa," katanya.

Sekadar informasi, 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ditetapkan dalam rangka untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Namun beberapa tahun belakangan ini, angka kekerasan terhadap anak-anak masih tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat mencatat, dari Januari - Juni 2023, ada 1.600-an laporan berkaitan dengan kasus anak. Dari jumlah itu, sebanyak 400-an kasus merupakan kasus seksual terhadap anak.

KPAI menyatakan bahwa kasus kekerasan pada anak sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. • mei

PBNU: Undangan Harlah PKB untuk Ketua Umum Gus Yahya Hoaks

JAKARTA (IM) - Wakil Sekjen PBNU, Sulaeman Tanjung, memastikan hingga hari ini tidak ada undangan Harlah dari DPP PKB untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

"Kalau ada yang bilang Ketua PBNU diundang di Harlah PKB itu Hoax. Hingga saat ini tidak ada undangan dari PKB," kata Sulaeman Tanjung, Minggu (23/7).

Sulaeman mengatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang mengatakan partainya mengundang Ketua PBNU dalam Harlah PKB yang akan digelar pada Minggu (23/7) di Solo.

"Jadi undangan dari PKB kepada PBNU sejauh ini hoax. Yang tidak hoaks itu Harlah NU di Sidoarjo mengundang seluruh Ketua Partai tapi Cak Imin tidak berani hadir," tegas Sulaeman. Sulaeman juga menyanyan-

kan statemen Cucun Ahmad Syamsurijal yang seakan telah mengundang Ketua PBNU padahal undangan itu sama sekali tidak ada.

"Di PBNU itu sistem persuratannya sangat rapi. Surat masuk dan keluar tertata dengan rapi dan masuk dalam sistem IT yang terintegrasi sehingga bisa ketahuan kapan ada surat masuk, kepada siapa surat ditujukan dan kapan ada surat keluar," kata Sulaeman.

"Mungkin PKB sistem surat menyuratnya perlu meniru PBNU biar ketahuan apakah memang ada undangan untuk Ketua PBNU? Atau jangan-jangan undangannya memang tidak ada jadi hanya hoax semata," ujar Sulaeman.

Sekadar diketahui, Cucun Ahmad Syamsurijal pada Kamis (20/7) kepada wartawan mengatakan, partainya telah berikim undangan kepada Ketua PBNU untuk hadir di Harlah PKB yang akan digelar di Solo. • mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PERESMIAN KANTOR KPU PAPUA BARAT DAYA

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari (kanan) meyakini penyerahan hibah kantor KPU Papua Barat Daya dari Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (ketiga kiri) kepada Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambo (kedua kanan) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (23/7). Ketua KPU RI meresmikan kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya setelah sebelumnya berkantor di kantor KPU Kota Sorong.

KPK Duga Ada Transaksi Gelap Terkait Pengadaan Lahan di PTPN XI

KPK tengah menyidik kasus baru dugaan korupsi pengadaan lahan HGU di PTPN XI untuk perkebunan tebu di daerah Jawa Timur (Jatim).

JAKARTA (IM) - Pengadaan lahan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI diduga ada transaksi gelap. KPK saat ini sedang menelisik proses persiapan pengadaan lahan untuk PTPN XI yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

Dugaan tersebut didalami KPK lewat 13 saksi yakni, Baskoro Waluyo merupakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, Beta Roosyanto merupakan Staf Khusus Direksi PTPN XI, Raden Rara Retno Koerniasih merupakan Kepala Divisi Hu-

PTPN XI Tahun 2017 sampai 2020, Chrisdiyanto Triwibowo sebagai Staf Divisi Manajemen Risiko PTPN XI, Dedy Satrio Kabag Pengadaan dan Pemasaran PTPN XI, serta Dody Daud Wattie sebagai Kaur Bibit dan Administrasi Tanaman Divisi Tanaman.

"Para saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan persiapan pengadaan lahan untuk PTPN XI dan dugaan adanya beberapa item transaksi jual beli yang dipaksakan termasuk area lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (23/7/2023).

KPK saat ini sedang menyidik kasus baru dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU)

di PTPN XI untuk perkebunan tebu di daerah Jawa Timur (Jatim). Pengadaan lahan tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam proses penyidikan perkara baru ini. Tapi, KPK masih belum mengumumkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK baru akan mengumumkan para tersangka serta konstruksi perkara setelah adanya proses penahanan.

"Detail dari perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat setelah proses penyidikan ini cukup, termasuk nanti pasal-pasal yang akan dipanggil pasti kami akan sampaikan," beber Ali.

KPK masih terus mengumpulkan bukti tambahan untuk membuat terang proses penyidikan ini lewat serangkaian pengeledahan. Sejumlah lokasi yang digeledah yakni Kantor PTPN XI di Surabaya; Kantor perusahaan gula Assembagoes di Situbondo; serta beberapa kantor pihak swasta dan rumah kediaman pihak terkait lainnya.

KPK juga telah mencegah lima orang yang diduga berkaitan dengan kasus ini untuk bepergian ke luar negeri. Kelima orang tersebut yakni, Direktur Operasional PTPN XI, Mochamad Cholidi; Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI, Mochamad Khoiri; Komisaris PT Kejayan Mas, Muchin Karli; serta Pengusaha asal Surabaya, Haliem Hoentoro; dan Sulanie Anggawidjaja Haliem. • han

Gerindra: Isu HAM HIM HUM HEM HOM Muncul 5 Tahunan, Isu Lama Direproduksi

JAKARTA (IM) - Partai Gerindra tidak ambil pusing terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap di tuduhkan kepada ketua umum mereka, Prabowo Subianto. Sebab, isu seperti itu selalu muncul menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, isu itu selalu muncul menjelang pilpres.

"Kan ham him hum hem hom muncul lima tahunan. Jadi kalau kami sudah tahu

kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang pilpres," kata Muzani usai konsolidasi kader Gerindra di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (23/7).

"Karena itu kami enggak perlu mikirin," tutur Muzani.

Muzani menyatakan, Partai Gerindra 'jalan terus' dan tidak melihat ke belakang. "Karena niat kami berbuat baik kepada bangsa dan negara," katanya.

Prabowo subianto sebelumnya sudah angkat bicara me-

ngenai tuduhan-tuduhan yang didapatnya buntut tragedi 1998, saat itu ia menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, kerap dicap sebagai penculik hingga pembunuh para aktivis yang menuntut Soeharto mundur.

"Saya sudah empat kali ikut pemilu. Dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka poling saya agak bagus, ya mulai keluar (isu pelanggaran) HAM ini dan sebagainya," ujar Prabowo dalam program "Mata Najwa", dikutip pada

Jumat (30/6) lalu.

Apalagi, kata Prabowo, dalam negara yang menganut sistem demokrasi liberal, biasanya lawan politik harus diturunkan popularitasnya.

"Kalau bisa, dijejek-jejekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah ini fenomena di banyak negara. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari segala macam," tutur Prabowo.

Pada cara konsolidasi di Lapangan Blok S hari ini, Muzani berpesan kepada kader

agar membantu memenangkan Gerindra dan Prabowo sebagai presiden. Pada hari yang sama, konsolidasi juga digelar di Bogor dan Bekasi.

"Kami melakukan konsolidasi intenal lebih dahulu agar kami lebih siap baik mempersiapkan saksi maupun memenangkan pemilu di tingkat RT, RW, dan TPS. Karena di Jabodetabek itu sebagai ring depan kami persiapan dan kuatkan," kata Muzani. "Targetnya Gerindra menang, Prabowo presiden," ucap Muzani. • han

Gugat ke MK, Warga Tangsel Minta Akademisi Tak Kena Pasal Penodaan Agama

JAKARTA (IM) - Warga Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rega Felix, menggugat UU Pendidikan Tinggi dan UU Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pria yang berprofesi sebagai advokat itu ingin para akademisi tidak dikenakan pasal penodaan agama.

"Menyatakan frasa 'menjunjung tinggi nilai - nilai agama' dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat'," demikian permohonan Rega Felix sebagaimana dilansir website MK, Minggu (23/7).

Dalam argumennya, ia menyatakan Indonesia masih berkebut dalam perdebatan mengenai dampak positivisme yang mencabangkan rumpun ilmu pengetahuan. Indonesia masih berupaya memilah-milah cabang pengetahuan dan masih berdebat dalam memilih pengetahuan agama dan pengetahuan non agama.

"Kita masih mencari mana yang lebih penting dan mencari siapa yang merupakan otoritas untuk menyatakan benar dan salah seperti pada zaman pertengahan," ucapnya.

Menurutnya, saat ini Indonesia telah memasuki era

informasi, di mana terdapat ledakan pengetahuan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Baik revolusi neolitikum maupun revolusi industri umat manusia telah melewatinya.

"Zaman tidak bisa ditolak karena terus berjalan, hanya saja kita harus menentukan berada di mana kita. Pada kondisi seperti ini sebaiknya - baiknya sikap adalah menyalah (altruistik) dan menurunkan keangkuhan kita untuk mendengarkan kebenaran," ungkapnya.

Pengaruh pemerintah terhadap sivitas akademika sangat kuat. Hal ini menyebabkan sivitas akademika di Indonesia memang masih mengalami rasa takut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Seorang profesor ketika memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menafsirkan persoalan agama yang berbeda dengan keterangan Pemerintah justru setelahnya dicopot dari jabatannya.

"Padahal ketika memberikan keterangan sebagai ahli, sebelumnya memberikan sumpah untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan sebenar-benarnya. Dengan kejadian tersebut, apakah seharusnya sumpah seorang ahli di pengadilan harus diganti menjadi: 'akan memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan arahan Pemerintah'? Apakah Sivitas

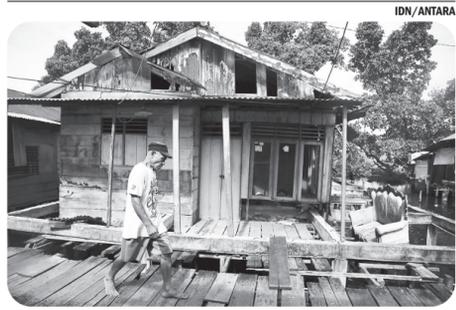
Akademika harus selalu menjadi bagian dari Pemerintah itu sendiri? Hati nurani yang dapat menjawab hal ini," tegasnya.

Fenomena yang menarik belakangan ini, lanjutnya, terjadi adalah ketika suatu negara agama yang konservatif membuka keran kebebasannya ternyata terjadi peningkatan jumlah ateisme di negara tersebut. Di sisi lain, di negara - negara sekuler yang justru melarang agama dalam pendidikan dan menjunjung tinggi kebebasan justru mengalami peningkatan penganut agama tertentu.

"Di lain hal, ketika hal tersebut terjadi justru demonstrasi dengan membakar kitab suci tertentu terjadi, yang pada akhirnya Pemerintah negara sekuler mulai mempertimbangkan untuk membatasi ekspresi kebebasan yang membakar kitab suci untuk alasan keamanan," katanya.

Negara yang menerapkan agama secara konservatif justru melahirkan gelombang imigran yang mencari kebebasan, tetapi justru negara penerima imigran kaget dengan heterogenitas hingga isu imigrasi menjadi isu yang sangat sentral di negara tersebut.

Selain itu, justru ternyata di negara - negara sekuler Pemerintahnya memperjuangkan sistem ekonomi baru yang berbasiskan nilai - nilai agama. • han



IDN/ANTARA

TARGET PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA

Warga melintas di permukiman padat penduduk di Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (23/7). Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di 212 Kabupaten/Kota pada tahun 2024, seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

BNPT: Semua Usaha Dilakukan untuk Bebaskan Pilot Susi Air

JAKARTA (IM) - Kepala BNPT Rycko Amelza Dahnie mengatakan, segala upaya terus dilakukan untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang kini disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

"Penanganan KKB sudah menjadi satu satgas ada TNI, Polri, BNPT ada berbagai lembaga kementerian di sana kita sudah mengambil keputusan untuk menyelamatkan dia kan," ujar Kepala BNPT Rycko Amelza Dahnie kepada wartawan di Menteng, Jakpus, Minggu (23/7).

Masalah kekerasan di Papua sudah menjadi sorotan media. Rycko pun meminta bantuan media agar dapat mendorong perdamaian dengan memberhentikan kekerasan di sana.

"Nah ini memang, tadi, masalah kekerasan di Papua ini memang menjadi salah satu sorotan media ini dan

tentunya kita minta bantuan dari media kawan-kawan dari media untuk mendorong perdamaian untuk menyempit kekerasan di sana," ujarnya.

Negosiasi dengan KKB sudah dilakukan dengan segala cara dari soft hingga hard. Kini yang paling penting adalah menyelamatkan sandera.

"(Negosiasi) semua cara dilakukan, mulai soft hingga hard kita lakukan semuanya. Yang paling terpenting sekarang adalah menyelamatkan dari sandera itu, semua usaha kita lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, warga Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menderita sejak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya menyandera pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Nyawa masyarakat terancam akibat rentetan teror yang dilancarkan KKB sejak penculikan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. • han



IDN/ANTARA

ANGGARAN SUBSIDI PERINTIS ANGKUTAN UDARA 2024

Warga mengabadikan pesawat Batik Air saat akan mendarat di Bandara Sultan Babullah Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (23/7). Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran subsidi perintis angkutan udara pada 2024 sebesar Rp 554 miliar atau sekitar 13,5 persen dari total anggaran subsidi perintis untuk semua moda transportasi yang bernilai Rp4,1 triliun.